

## **D. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.**

### **1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN**

Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan adalah Pembinaan dan Pengawasan.

### **2. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan ini adalah Inspektorat Kabupaten Balangan.

### **3. KEBIJAKAN STRATEGIS**

#### **a. Kebijakan Strategis**

Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif.

#### **b. Dasar Hukum**

Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021

#### **c. Tujuan dan Masalah yang diselesaikan**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN

### **4. URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b. Reviu Laporan Kinerja
  - c. Reviu Laporan Keuangan
  - d. Pengawasan Desa
  - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 

Kegiatan :

  - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan :

- 1) Pendampingan dan Asistensi
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## **5. TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Program : Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat

Target Kinerja : 71 BB

Indikator Program : Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik

Target Kinerja : 100%

#### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disampaikan Dengan Baik

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Indikator Kinerja : Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik
  - Target Kinerja : 100%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik
  - Target Kinerja : 100 %
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentasi Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik

Target Kinerja : 100 %

## **2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja : Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

### **a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator Kinerja : Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan

Target Kinerja : 100%

### **b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator Kinerja : Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan

Target Kinerja : 100%

## **3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

### **a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator Kinerja : Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Target Kinerja : 70 stel

### **b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Target Kinerja : 30 Pegawai

c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Kinerja : Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Target Kinerja : 30 Pegawai

**4) Adiministrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target Kinerja : 12 Bulan

b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Target Kinerja : 12 Bulan

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Target Kinerja : 120 Eksemplar

d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja : Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan

Target Kinerja : 100%

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator Kinerja : Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Kinerja : 100%

**5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja : Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Target Kinerja : 12 Bulan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja : Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat

Target Kinerja : 12 Bulan

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja : Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target Kinerja : 100%

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target Kinerja : 12 Bulan

**6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja : Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Indikator Kinerja : Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya

Target Kinerja : 4 unit

**7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja : Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah

Target Kinerja : 12 Bulan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja : Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi

Target Kinerja : 100

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja : Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi

Target Kinerja : 100

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Indikator Program : Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Target Kinerja : 75%

### **1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

Indikator Kinerja : Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan

Target Kinerja : 60%

Indikator Kinerja : % SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB

Target Kinerja : 45%

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

#### **a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan tepat waktu

Target Kinerja : 33 LHP

#### **b. Reviu Laporan Kinerja**

Indikator Kinerja : Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu

Target Kinerja : 2 LHP

#### **c. Reviu Laporan Keuangan**

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu

Target Kinerja : 1 LHP

#### **d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Indikator Kinerja : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti

Target Kinerja : 50 Rekomendasi

## 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja : Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal

Target Kinerja : 50%

Indikator Kinerja : Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan

Target Kinerja : 100%

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

### a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Indikator Kinerja : Prosentase penyelesaian kerugian daerah

Target Kinerja : 70 %

### b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan tepat waktu

Target Kinerja : 73

## 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator Program : Prosentase Unit Pelayanan Publik yang Mendapat Predikat WBK

Target Kinerja : 13%

Indikator Program : Level Maturitas SPIP

Target Kinerja : 3 (3,02) Level

Indikator Program : Indeks Integritas

Target Kinerja : 78%

Indikator Program : Level kapabilitas APIP

Target Kinerja : Level 3

### 1) Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja : Persentase dengan nilai Maturitas SPIP Level 3

Target Kinerja : 30%

Indikator Kinerja : Nilai PMPRB

Target Kinerja : 70%



Indikator Kinerja : Persentase Pencapaian Indikator MCP

Target Kinerja : 75%

Indikator Kinerja : Persentase SKPD / Unit Kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat menuju WBK

Target Kinerja : 13%

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Profil Risiko SKPD

Target Kinerja : 30 LHA

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang dilakukan PMPRB

Target Kinerja : 12 SKPD

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Indikator Kinerja : Jumlah SKPD yang dilakukan PMPRB

Target Kinerja : 12 SKPD

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Indikator Kinerja : Prosentase unit kerja yang lulus verifikasi data dukung penilaian WBK/WBBM

Target Kinerja : 50 %

## **6. REALISASI/CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (REALISASI FISIK DAN % CAPAIAN KINERJA FISIK)**

#### **CAPAIAN KINERJA PROGRAM**

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Indikator Program : Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat

Target Kinerja : BB (71)

Realisasi : BB (73,03)

Capaian Kinerja : 102%

b. Indikator Program : Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik

Target Kinerja : 100%  
Realisai : 100%  
Capaian Kinerja : 100%

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Indikator Program : Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan  
Target Kinerja : 75%  
Realisasi : 89%  
Capaian Kinerja : 119%

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

a. Indikator Program : Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM  
Target Kinerja : WBK :1 dan WBBM :1  
Realisasi : -  
Capaian Kinerja : -

Pada Tahun 2021 telah dilakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas dalam rangka pengusulan unit kerja berpredikat WBK/WBBM untuk 3 SKPD. Sampai laporan ini disusun hasil PMZI belum dikeluarkan oleh Kementrian PAN & RB.

a. Indikator Program : Level Maturitas SPIP  
Target Kinerja : 3 (3,02) Level  
Realisai : 100%  
Capaian Kinerja : 100%

b. Indikator Program : Indeks Integritas  
Target Kinerja : 78%  
Realisai : 76,52%  
Capaian Kinerja : 98%

c. Indikator Program : Level kapabilitas APIP  
Target Kinerja : Level 3  
Realisai : 100%  
Capaian Kinerja : 100%

## **CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Keluaran : Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik.
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang meliputi dokumen Renstra, Renja Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021, RKA dan DPA tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disusun tepat waktu.
- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Keluaran : Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik
  - Hasil : Tersusunnya dokumen Renja dan Renstra Inspektorat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tepat waktu
  - Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu tersusunnya dokumen Renja Inspektorat Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021 serta Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang baik
  - Hasil : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% . Yaitu tersedianya Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Keluaran : Persentasi Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan baik
  - Hasil : Tersedianya dokumen Evaluasi kinerja per triwulan tahun 2021

- Realisasi fisik sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 100 % yaitu tersedianya laporan evaluasi kinerja per triwulan pada tahun 2021.

## **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Keluaran : Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua Administrasi Keuangan di Inspektorat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku .

### **a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

- Keluaran : Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan
- Hasil : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan perundang-undangan

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu semua ASN Inspektorat dibayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

- Keluaran : Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan
- Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Inspektorat

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu Laporan Keuangan Inspektorat

## **1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Keluaran : Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua kegiatan Administrasi Kepegawaian di Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku

### **a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

- Keluaran : Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Hasil : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN Inspektorat

Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas sebanyak 70 stel

b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
- Hasil : Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi berdasarkan tugas dan fungsi

Realisasi fisik kegiatan sebesar 34 % yaitu sebanyak 12 ASN Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan.

c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Keluaran : Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- Hasil : Jumlah aparatur yang memahami materi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 93 % yaitu sebanyak 28 ASN Inspektorat yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

#### **1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Keluaran : Pemenuhan administrasi perangkat daerah
  - Realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % semua kegiatan Administrasi Umum di Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
- a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Keluaran : Jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Hasil : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu terpeliharanya penerangan lingkungan kantor Inspektorat selama 12 bulan

b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Keluaran : Persentasi ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan
  - Hasil : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya pengadaan laptop sebanyak 8 unit dan 6 buah printer.

c) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Keluaran : Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Hasil : tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% yaitu terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.

d) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Keluaran : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% yaitu terlaksananya pengadaan surat kabar/Koran sebanyak 120 eksemplar selama 12 bulan.

e) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Keluaran : Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Hasil : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 % yaitu terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi pada Inspektorat

### **1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Keluaran : Persentasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU
  - Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 % yaitu terlaksananya pengadaan BMD
- a) Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- Keluaran : Jumlah pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya

- Hasil : Terlaksananya pembanguna sarana dan prasana gedung kantor
- Realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 100% yaitu telah terbangun tempat parker sebanyak 1 unit, pembangunan paving blok pada halaman kantor, Taman Kantor dan Pantry.

## 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

### a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Keluaran : Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat
- Hasil : Tercapainya efektifitas penyelesaian pekerjaan pelayanan bidang pengawasan

Realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100 % yaitu terlaksananya pengelolaan kegiatan surat menyurat di Inspektorat selama 12 bulan.

### b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Keluaran : Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor Inspektorat

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100% yaitu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan dari target yang telah ditetapkan selama 12 bulan

### c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Hasil : Tersedianya Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100%. Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi capaian kinerja sebesar 100% yaitu Penyediaan

Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan dari target yang telah ditetapkan selama 12 bulan.

### **1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Keluaran : Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Realisasi Realisasi fisik kegiatan sebesar 100% yaitu semua Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara dalam kondisi layak fungsi selama 12 bulan.

a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Keluaran : Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi
- Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi layak fungsi

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100%. Untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi capaian kinerja sebesar 100% yaitu semua Kendaraan Dinas Operasional dapat dipelihara dalam kondisi layak fungsi selama 12 bulan.

b) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Keluaran : Prosentase gedung kantor dan bangunan lainnya yang layak fungsi
- Hasil : Terpeliharanya Gedung kantor dalam kondisi layak fungsi

Realisasi fisik sub kegiatan sebesar 100%. Untuk sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 100% yaitu semua Gedung kantor dapat dipelihara dalam kondisi layak fungsi selama 12 bulan.

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

### **2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- Keluaran : - Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB



- Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan
- Realisasi Fisik kegiatan ini adalah :
  - Untuk indicator Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB sebesar 43 % yaitu terdapat 18 SKPD mendapatkan hasil evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan nilai BB
  - Realisasi fisik untuk indicator Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan sebesar 50 % dari target 60 % SKPD yang bebas temuan
- a) Sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disampaikan tepat waktu
  - Hasil : Terlaksananya kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah sebesar 121% yaitu terdapat 40 Laporan Hasil Pengawasan sebanyak 40 dari target 33 LHP.
- b) Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja
  - Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu
  - Hasil : Terlaksananya kegiatan Reviu

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah sebesar 100 % yaitu tersedianya laporan hasil reviu LKIP dan Reviu LPPD
- c) Sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan
  - Keluaran : Jumlah laporan hasil reviu keuangan yang disampaikan tepat waktu
  - Hasil : Terlaksannaya kegiatan reviu laporan keuangan

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah sebesar 100 % yaitu tersusunnya laporan hasil reviu LKPD Tahun 2020
- d) Sub kegiatan Pengawasan Desa
  - Keluaran : Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang disampaikan tepat waktu
  - Hasil : Terlaksananya kegiatan pengawasan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan

Realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 133% yaitu pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengawasan desa sebanyak 4 obyek pemeriksaan dari target 3 obrik.

e) Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

- Keluaran : Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti
- Hasil : Penyelesaian Tindak lanjut hasil temuan rekomendasi baik dari BPK Ri, BPKP, Inspektorat Propinsi dan APIP

Realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 90 % yaitu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 87 % sedangkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sebesar 90%.

## 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Keluaran : - Persentase SKPD di wilayah yang bebas temuan keuangan material eksternal  
- Persentase hasil pemeriksaan kasus /investigasi yang diselesaikan
- Hasil : Meningkatnya kepatuhan SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan  
Tertanganinya pengaduan masyarakat

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah pada tahun 2021 terdapat 6 kasus berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat dan telah dilaksanakan audit investigasi terhadap laporan tersebut.

a) Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah

- Keluaran : Persentase penyelsaian kerugian daerah
- Hasil : Telah dilakukan penyetoran kerugian ke kas daerah

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah pada tahun 2021 terdapat kerugian daerah sebesar Rp. 1.408.853.070,62 dan telah diselesaikan dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp. 585.912.389,62 sehingga sisa TGR Kabupaten Balangan sebesar Rp.822.940.681,-

b) Sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu

- Keluaran : Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang disampaikan tepat waktu
- Hasil : Telah terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu

Realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 125% pada yaitu telah tersusun 91 LHP dari target 73 LHP.

### **3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

#### **3.1 Pendampingan dan Asistensi**

- Keluaran :
  - presentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku
  - Nilai PMPRB
  - Persentase Pencapaian Indikator MCP
  - Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM
- Realisasi Fisik untuk kegiatan ini adalah seluruh SKPD yaitu 30 SKPD telah menyusun profil risiko dalam rangka upaya pengendalian terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan, Nilai PMPRB 2021 75,63 dari target 70 atau capaiannya sebesar 108%, Indeks pencapaian MCP sebesar 83,91 dimana indeks tersebut diatas target yang telah disepakati dalam penandatanganan komitmen oleh Bupati Balangan dengan KPK yaitu pada indeks 80, dan pada tahun 2021 Kabupaten Balangan telah mengusulkan 3 unit kerja pelayanan untuk penilaian Unit Kerja berpredikat WBK WBBM yaitu Disdukcatpil, RSUD dan DPMTSP.

a) Sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah

- Keluaran : Jumlah laporan hasil asistensi profil risiko SKPD
- Hasil : telah dilaksanakannya asistensi terhadap seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka membangun sistem pengendalian di tingkat SKPD

Realisasi fisik kegiatan ini adalah 100% yaitu tersusunnya 30 Laporan hasil asistensi profil risiko.

- b) Sub kegiatan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
- Keluaran : Jumlah SKPD yang dilakukan PMPRB
  - Hasil : Telah dilaksanakannya asistensi dan pendampingan kepada 18 SKPD dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi tahun 2021

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah sebesar 83% yaitu dari target 12 SKPD yang akan diajukan penilaian melalui aplikasi PMPRB online 2021 dan sebanyak 10 SKPD yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi penilaian PMPRB 2021.

- c) Sub kegiatan kordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Keluaran : Persentase pemenuhan data dukung indicator MCP
  - Hasil : Telah terpenuhinya indicator penilaian terhadap 8 area intervensi

Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah sebesar 90% yaitu terpenuhinya indicator penilaian MCP pada area Perencanaan dan penganggaran sebesar 94,3%, Area intervensi pengadaan barang dan jasa sebesar 81,3%, Area intervensi perizinan sebesar 94,4%, area intervensi pengawasan APIP sebesar 79,9%, Area intervensi Manajemen ASN sebesar 81,5%, Area intervensi Optimalisasi pajak daerah sebesar 87,7%, Area intervensi Manajemen Aset Daerah sebesar 72,5 % dan Tata Kelola Keuangan Desa sebesar 75,3%.

- d) Sub kegiatan pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan integritas
- Keluaran : Persentase unit kerja yang lulus verifikasi data dukung penilaian WBK/WBM
  - Hasil : telah dilakukan pendampingan dan asistensi terhadap unit kerja yang diusulkan penilaian WBK/WBBM

Realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 60% dari target 50% realisasi sebesar 30% yaitu terdapat 3 unit kerja yang lulus verifikasi

**B. CAPAIAN KINERJA KELUARAN  
(REALISASI KEUANGAN DAN % CAPAIAN KINERJA KEUANGAN)**

Alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Balangan pada tahun 2021 pada APBD murni berjumlah Rp. 9.782.806.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 9.641.353.000,00

Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 8.669.817.569,00 atau sekitar 89% dari APBD Perubahan Inspektorat.

Berikut rincian alokasi dan realisasi dana untuk masing masing kegiatan :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah senilai Rp. 14.250.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 86.360.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 54%.

**b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah senilai Rp. 18.525.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 6.391.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 34%.

**c. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah senilai Rp. 22.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 20.700.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92%.

## 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah senilai Rp. 4.173.955.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 4.101.086.413,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98%.

### b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dana yang dialokasikan untuk sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah senilai Rp. 6.425.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 1.875.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 29%.

## 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

### a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah senilai Rp. 52.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.52.500.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.

### b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah senilai Rp.432.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.242.908.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 56%.

### c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah senilai Rp.432.000.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.242.908.600,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 56%.

#### 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah senilai Rp. 8.843.725,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 8.843.725,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah senilai Rp. 214.050.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.207.975.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah senilai Rp. 56.807.600,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 30.950.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 54%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah senilai Rp. 9.840.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.6.360.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 64%.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah senilai Rp. 684.535.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.646.932.484,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94%.

### 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah senilai Rp.750.854.800,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja modal. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 746.330.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94%.

### 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah senilai Rp. 5.150.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 3.674.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 71%.

#### b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah senilai Rp. 116.400.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.103.625.385,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89%.

#### c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana yang dialokasikan untuk sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah senilai Rp.218.770.875,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.148.506.484,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 67%.

### 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah senilai Rp.285.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan



jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.245.785.518,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 86%.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah senilai Rp.133.768.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 121.660.642,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90%.

## II. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

### 2.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah adalah senilai Rp.50.760.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.37.490.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 73%.

- b. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja adalah senilai Rp.60.500.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.57.000.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94%.

- c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan adalah senilai Rp.135.750.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 126.680.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93%.

d. Pengawasan Desa

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Desa adalah senilai Rp. 92.250.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.89.005.875,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%.

e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah senilai Rp.277.603.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.105.905.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 38%.

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah senilai Rp. 90.640.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 34.850.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 38%.

b) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Dana yang dialokasikan untuk sub Kegiatan Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah senilai Rp.646.340.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp. 573.435.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88%.

**III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

**3.1 Pendampingan dan Asistensi**

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah senilai Rp.146.630.000,- yang semuanya dialokasikan

untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.119.889.400,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 81%.

- b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah senilai Rp.146.630.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.119.889.400,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 81%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah senilai Rp. 415.405.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.362.963.800,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 87%.
- d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  
Dana yang dialokasikan untuk sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah senilai Rp.84.820.000,- yang semuanya dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dan realisasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2021 sebesar Rp.70.054.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82%.

**A. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

Berikut disampaikan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk Tahun Anggaran 2021 :

No	Sasaran	Indikator	Nama Program	Target	Nama Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pengelolaan Aset	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	71 (BB)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp. 55.275.000,-
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp.4.180.380.000,-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp. 815.760.000,-
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp. 974.076.325,-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp. 340.320.875,-
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp. 750.854.800,-
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	Rp. 419.268.000,-

					Pemerintahan Daerah		
--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Berdasarkan analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja mempunyai target kinerja sebesar 71 (BB) dan indikator kinerja Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik dengan target kinerja 100% , dimana capaian program ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan anatara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 55.275.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 4.180.380.000,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 815.760.000,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 974.076.325,-
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 340.320.875,-
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 750.854.800,-
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 313.127.168,-

No	Sasaran	Indikator	Nama Program	Target	Nama Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
2	Meningkatnya kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	75%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	60 %	Rp. 616.863.000,-
						45%	
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	50%	Rp. 736.980.000,-
						100%	

Berdasarkan analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja program yaitu Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan mempunyai target kinerja sebesar 75%, dimana capaian program ini didukung oleh capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 616.863.000,-
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan pagu anggaran Rp. 736.980.000,-

No	Sasaran	Indikator	Nama Program	Target	Nama Kegiatan	Target	Pagu Anggaran
3	Mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan efektif	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	WBK 1 WBBM 1	Pendampingan dan Asistensi	WBK 1 WBBM	Rp. 654.428.543,-
		Level Maturitas SPIP		Level 3 (3,02)		Level 3 (3,02)	
		Indeks Integritas		78		78	
		Level Kapabilitas APIP		Level 3		Level 3	

Berdasarkan analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja program yaitu :

1. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM mempunyai target kinerja WBK 1 dan WBBM 1
2. Level maturitas SPIP mempunyai target kinerja Level 3 (3,02)
3. Indeks Integritas mempunyai target 78
4. Level kapabilitas APIP mempunyai target Level 3

Capaian program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh capaian kinerja kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 654.428.543,-

## **7. PERMASALAHAN**

- a. Tingkat kepatuhan SKPD/Desa atas rekomendasi hasil pemeriksaan hal ini dapat dilihat masih adanya temuan yang belum selesai ditindaklanjuti baik temuan eksternal maupun internal APIP sendiri
- b. Masih kurangnya jumlah tenaga pengawas yang dimiliki oleh Inspektorat yaitu Auditor sebanyak 13 Orang dan P2UPD sebanyak 6 orang. Jumlah Aparatur Pengawas ini tidak sebanding dengan Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan
- c. Belum optimalnya kinerja (performance) aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkorelasi linier dengan kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

## **8. UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN**

- a. Perlunya pelatihan dan bimbingan untuk semua aparatur agar lebih memahami dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- b. Terus menerus mengupayakan konsultasi, koordinasi dan konsolidasi yang intensif dan berkelanjutan (sustainable) dengan instansi terkait di bidang kepegawaian, guna tercapainya sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian. Melakukan Pembekalan (upgrading) dari sisi pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) bagi Pegawai Negeri Sipil melalui kursus-kursus singkat/pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh lembaga yang secara legal dan empiris berkualitas. Selain itu pemberian motivasi yang simultan juga diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada dan dianggap baik.
- c. Mengajukan usulan ke Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah guna menambah tenaga aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Balangan.
- d. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja atas perencanaan yang telah disusun serta pembinaan dan pemberdayaan yang terus menerus dan simultan oleh atasan langsung kepada bawahannya berdasarkan prinsip manajemen partisipasi untuk mencapai tujuan-tujuan (goals) organisasi.

**9. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA**

Pada tahun 2020 untuk Inspektorat Kabupaten Balangan tidak terdapat rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2020.

Mengetahui,

Inspektur  
Kabupaten Balangan

**Erwan Mega Karya Latief, SKM., M.Kes**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700510 199501 1 001